

ABSTRAK

Kabupaten Sumenep memiliki permasalahan serius terkait pertambangan tanpa izin, dengan spesifikasi tambang fosfat dan pasir yang mencapai total 206 pelaku usaha belum/tidak memiliki izin yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang – Undang Minerba dan Pasal 98 UUPPLH. Hal ini didasarkan karena lemahnya penegakan hukum terpadu antara Kepolisian dan PPNS-LH, dimana antara keduanya seringkali berjalan secara tunggal tanpa kolaborasi efektif yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 95 UUPPLH. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terpadu antara Kepolisian dan PPNS-LH di Kabupaten Sumenep.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder (bahan hukum) dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 95 UUPPLH tidak diimplementasikan dengan baik dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep. Keterpaduan antara Kepolisian, PPNS-LH dan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik, sehingga tercipta sinergi yang kuat dan penegakan hukum lingkungan yang saling berintegrasi, harmonis dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi, Penyidikan, Penegakan Hukum Terpadu, Pertambangan Tanpa Izin, Kabupaten Sumenep

ABSTRACT

Sumenep District has serious problems related to illegal mining, with phosphate and sand mining specifications reaching a total of 206 unlicensed businesses that violate the provisions of Article 158 of the Minerba Law and Article 98 of the UUPPLH. This is based on the weak integrated law enforcement between the Police and PPNS-LH, where the two often run singly without effective collaboration which is not in accordance with the mandate of Article 95 of the UUPPLH. Therefore this research was conducted to analyze the implementation of Article 95 of Law Number 32 of 2009 in law enforcement against unlicensed mining in Sumenep District and analyze the inhibiting factors that affect integrated law enforcement between the Police and PPNS-LH in Sumenep District.

The research method used is empirical juridical with a sociological juridical approach, this research uses primary and secondary data (legal materials) collected through observation techniques, interviews, documentation studies, and literature studies, analyzed descriptively evaluative..

The results of this study indicate that Article 95 of UUPPLH is not implemented properly in law enforcement against unlicensed mining in Sumenep District. The integration between the Police, PPNS-LH and the Prosecutor's Office in law enforcement against unlicensed mining can be done by increasing coordination and good cooperation, so as to create strong synergies and environmental law enforcement that is integrated, harmonious and efficient.

Keywords: Implementation, Investigation, Integrated Law Enforcement, Illegal mining, Sumenep District